



Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan: Studi Kasus di 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Ajeng Destiana Pangesti¹ dan Nano Prawoto¹

¹Departement of Economics, Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email korespondensi: ajengdstn@gmail.com

Abstrak: Salah satu cara menciptakan kesejahteraan yang merata yakni dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas, mengingat masyarakat adalah salah satu faktor penggerak roda ekonomi suatu daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, PDRB, UMK dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data panel dengan bantuan program Eviews 9.0 pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2015. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan terdapat hubungan positif pada variabel PDRB dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Jawa Timur. Sebaliknya pada variabel IPM dan UMK yang muncul dengan pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Jawa Timur.

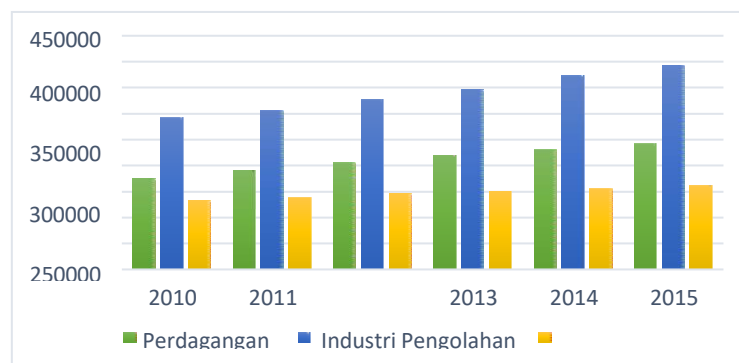
Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja; IPM; PDRB; UMK; Belanja Pemerintah.

Pendahuluan

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan dapat dinikmati oleh semua pihak (Sukirno, 2011). Salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan adanya kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan pembangunan ekonomi. Mengingat manusia berperan sebagai roda penggerak pembangunan, kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Perdagangan merupakan salah satu langkah tepat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor ini dianggap sangat efektif dalam penyerapan tenaga kerja, baik yang berskala kecil maupun besar. Dikatakan demikian karena hasil produk sektor perdagangan memiliki nilai tambah yang besar sehingga lebih menguntungkan daripada hasil produksi sektor lainnya. Dengan keuntungan yang besar ini sektor perdagangan juga akan memberikan kontribusi yang besar pula pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dapat dilihat melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gambar 1 menunjukkan kontribusi tiga sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri dari total keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur.

Dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikatakan sektor perdagangan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam sektor perdagangan ditunjukkan dalam tabel 1. Tabel 1 menggambarkan struktur ketenagakerjaan yang diklasifikasikan menurut jenis lapangan usaha. Diketahui bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja kedua di Jawa Timur setelah sektor pertanian dan disusul oleh sektor industri pengolahan pada urutan ketiga.



Gambar 1

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2015

Tabel 1 Penduduk Berumur >15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015.

Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	7.696.993	7.411.285	7.261.367	7.083.252
Pertambangan dan Galian Listrik, Gas, dan Air Bersih	144.683	121.951	143.338	125.813
Industri pengolahan	2.864.864	2.779.265	2.776.552	2.699.676
Listrik, Gas, dan Air	31.106	28.7	35.849	29.217
Bangunan	1.250.444	1.047.454	1.259.443	1.510.085
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	3.887.752	4.101.445	4.026.671	4.121.312
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	679.999	681.173	686.972	636.15
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	348.874	344.795	421.788	410.912
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	2.506.541	3.037.842	2.694.528	2.751.360

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun 2010-2015. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja kembali meningkat di tahun 2015.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian Nindy (2014) dengan menggunakan regresi data panel, ia menemukan bahwa PDRB dan harga modal di bidang pertanian berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, upah rill berpengaruh negatif. Serupa dengan penelitian Pangastuti (2015), ia menyimpulkan bahwa PDRB memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan upah minimum dan PAD berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel utama, Indradewa dan Natha (2015) dan Mirza (2012) menemukan bahwa IPM dan PDRB mempunyai hubungan positif

terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, UMP memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Di dalam IPM terdapat beberapa komponen seperti kesehatan, partisipasi sekolah dan lamanya bersekolah, angka melek huruf mewakili dalam bidang pendidikan, serta daya konsumsi masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat sesuai pengeluaran perkapita. Dengan adanya investasi pada setiap komponen tersebut, tentunya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila semakin tinggi tingkatan pendidikan seseorang maka akan mempengaruhi kualitas orang tersebut, terutama dalam hal bekerja. Ketika kualitas seorang pekerja bagus maka akan memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian mereka akan mendapatkan gaji yang besar ketika bisa memperoleh hasil yang banyak (Mulyadi, 2003).

Upah merupakan salah satu biaya produksi yang sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Biasanya perubahan upah akan cepat memberikan respon terhadap produksi perusahaan, sehingga perusahaan biasanya memilih untuk mengurangi jumlah produksinya. Dengan meningkatnya upah tenaga kerja maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin (Sumarsono, 2009).

Apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka permintaan terhadap jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, di mana peningkatan PDRB berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan (Arsyad, 1997). Dalam hal pengeluaran pemerintah, secara teoritis apabila terjadi peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan (Keynes, 1997) yang dikemukakan oleh Friedman.

Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data di 14 kabupaten/kota selama 6 tahun yang mana dengan metode ini akan memungkinkan peneliti mengetahui karakteristik pada tiap waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Peneliti memperoleh data pada penelitian ini dari berbagai sumber instansi terkait seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa penelitian ilmiah. Adapun model regresi panel dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Di mana:

- Y : Jumlah tenaga kerja terserap
- α : Konstanta
- X₁ : Indeks Pembangunan Manusia
- X₂ : Produk Domestik Regional Bruto
- X₃ : Upah Minimum Kabupaten/Kota
- X₄ : Belanja pemerintah
- β ... : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e : *Error term*
- t : Periode waktu ke-t
- i : Kabupaten/Kota

Penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa pengujian, yakni uji pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman, Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas, dan juga Uji Statistik analisis regresi melalui Uji Koefisien Determinasi, Uji F- statistik, dan Uji t-statistik.

Dengan menggunakan perbandingan F-hitung dan F-tabel, uji pemilihan model dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling tepat digunakan dalam penelitian, apakah *fixed effects model* atau *random effects model*. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melihat nilai probabilitas statistik pada masing-masing variabel. Dalam Uji Multikolinearitas, apabila nilai prob $< 0,1$ maka data dikatakan lolos masalah multikolinearitas. Sedangkan untuk Uji Heteroskedastisitas, jika nilai prob $> 0,05$ maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah heterokedastisitas. Uji statistik analisis regresi dilakukan dengan melihat masing-masing nilai probabilitas statistik tiap variabel pada setiap tingkat signifikansi.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Uji Chow menunjukkan nilai nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($7,323499 > 2,48$) dalam kata lain H_0 ditolak. Artinya model terbaik yang dapat digunakan untuk mengestimasi data panel adalah *Fixed Effects Model*.

Dari hasil Uji Hausman, data menunjukkan nilai probabilitas cross section random yang lebih dari 0,05 ($0,1682 > 0,05$), sehingga H_0 tidak ditolak. Artinya model terbaik untuk mengestimasi data panel adalah *Random Effects Model*.

Tabel 2 Uji Heterokedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-stat	Prob.
C	0.235	0.601	0.391	0.696
IPM	-0.001	0.006	-0.160	0.872
LOG(PDRB)	-0.008	0.050	-0.173	0.863
LOG(UMK)	0.026	0.072	0.364	0.716
LOG(GOV)	-0.040	0.079	-0.507	0.612

Sumber: Data diolah

Dari hasil Uji Heterokedastisitas didapat nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0,872, nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,863, nilai probabilitas variabel UMK sebesar 0,7168 dan nilai probabilitas variabel belanja pemerintah sebesar 0,612. Nilai probabilitas dari seluruh variabel masing-masing menunjukkan $p > 0,05$ yang berarti terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Variabel	C	IPM?	LOG(PDRB)	LOG(UMK)	LOG(GOV)
C	0.904	0.000	-0.036	-0.092	0.089
IPM	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000
LOG(PDRB)	-0.036	-0.000	0.008	0.003	-0.005
LOG(UMK)	-0.092	-0.000	0.003	0.013	-0.012
LOG(GOV)	0.089	0.000	-0.005	-0.012	0.016

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji multikolinearitas didapat nilai probabilitas masing-masing variabel independen $p < 0,90$, artinya model terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik *Random Effect*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.
C	10.855	0.950	11.416	0.000
IPM	-0.034	0.012	-2.766	0.007
LOG(PDRB)	0.502	0.091	5.503	0.000
LOG(UMK)	-0.203	0.115	-1.760	0.082
LOG(GOV)	0.256	0.128	1.992	0.049
Adj R-squared	0.441			
Prob(F-statistic)	0			

Sumber: Data diolah

Dari data di atas, dengan signifikansi 1 persen atau 0.01, dengan kata lain IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan dengan koefisien -0.034. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan IPM sebesar 1 poin maka akan berpengaruh pada penurunan dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebesar 0.034 poin. Sesuai dengan penelitian oleh Harfina (2009), tingginya Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja, hal ini dikarenakan tidak sesuai kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan di mana perusahaan cenderung mencari buruh yang upahnya tidak terlalu tinggi. Hal ini berhubungan dengan kualitas SDM mempengaruhi tingkat upah dari SDM tersebut.

Sesuai dengan hasil yang diharapkan, dengan tingkat signifikansi 1 persen, setiap 1 persen kenaikan PDRB akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebesar 5.02 persen. sesuai dengan penelitian Sella (2015) yang menyatakan peningkatan PDRB berarti peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga peningkatan aktivitas tersebut akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lebih banyak dari sebelumnya. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten tentunya akan berpengaruh pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap. Hal ini dikarenakan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk mengurangi tenaga kerja mereka (Arsyad, 1997). Sejalan dengan hasil penelitian, dengan tingkat signifikansi 10 persen, kenaikan UMK sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.03 persen.

Untuk variabel belanja pemerintah, dengan tingkat signifikansi 5 persen, peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 persen akan membuat penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan menurun sebesar 2.56 persen. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes (1997) dalam Friedman, di mana peningkatan belanja pemerintah yang dibarengi dengan pengurangan pajak akan mempengaruhi peningkatan pola konsumsi masyarakat. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga kerja secara agregat meningkat menyusul kebutuhan akan barang dan jasa yang meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pengujian, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berbeda dengan PDRB dan belanja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) muncul dengan tanda negatif, hal ini berarti IPM berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STI YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005-2015. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Tabel Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2010-2016. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Friedman, M. (1997). John Maynard Keynes. *FRB Richmond Economic Quarterly*, 83(2), 1-23. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=2129832>
- Harfina, D. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terselubung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 4(1), 15-32. <https://doi.org/10.14203/jki.v4i1.175>

- Indradewa., I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(8), 923-950. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/14385>
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.474>
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nindy, & I. (2014). pertumbuhan ekonomi dan penyerapan. *JEP*.
- Pangastuti, Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 203-211. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i2.14825>
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali
- Sumarsono. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.